

Jokowi Saksikan Geladi Bersih Upacara HUT Ke-78 RI di Istana

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan geladi bersih upacara HUT Ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/8).

Kepala Negara menyaksikan geladi bersih bersama istrinya, Iriana Jokowi. Keduanya tampak mengenakan pakaian pramuka. Diketahui keduanya sebelumnya menghadiri Rainas XII di Buperta, Cibubur.

Selain Jokowi, tampak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyaksikan geladi bersih upacara HUT Ke-78 RI.

Jokowi menyaksikan paskibraka yang melakukan pengibaran bendera. Terlihat para paskibraka bergerak rapi di hadapan Presiden dan berhasil membentangkan bendera.

Tidak hanya itu, Jokowi menyaksikan parade pesawat tempur dan helikopter dari TNI. Setelahnya, Jokowi menyaksikan pergelaran musik.

Informasi dari pihak Istana Kepresidenan Jakarta, geladi bersih diawali dengan prosesi penurunan bendera Merah Putih, kemudian dilanjutkan geladi proses pengambilan bendera pusaka Merah Putih dari kawasan Monumen

Nasional (Monas) yang berada di seberang Istana Merdeka.

Setelah itu, diadakan geladi pembacaan naskah Proklamasi. Lalu, acara geladi dilanjutkan dengan kirab budaya yang dibawa dalam drum band dari akademi TNI dan Polri. Dalam rangkaian kirab, terdapat pasukan berkuda dari Detasemen Kuda Kavaleri TNI AD. Di belakangnya, ada raja-raja Nusantara dari 38 provinsi.

Rangkaian kirab dilanjutkan dengan barisan pelajar yang berasal dari SMA 3 Jakarta dan SMA 4 Jakarta. Rangkaian diakhiri dengan barisan ibu-ibu yang mengenakan kebaya.

Menurut penanggung jawab geladi bersih, Brigjen TNI Arkameli Karmani, persiapan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT ke-78 RI di Istana Merdeka sudah mencapai 90 persen.

"Kalau saya bilang, ini udah 90 persen sudah oke. Hanya yang belum kita ketahui siapa pemain utamanya, pembawa baki siapa, komandan upacara siapa, yang pagi siapa, yang sore siapa, nanti baru diketahui pada hari H-nya," ujar Arkameli kepada wartawan. ● mei

Wamenhan Janji Bakal Ganti Semua Alutsista Usang dengan Baru

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra menegaskan, pihaknya akan memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah rusak atau usang untuk diganti dengan yang baru. Ia mengatakan akan ada modernisasi bertahap terkait alutsista TNI Angkatan Udara (AU).

"Kita akan terus memperkuat, memodernisasi seluruh alutsista kita. Karena memang sementara kita baru ada anggaran untuk 5 (pesawat). Tapi ke depannya kita akan mengganti semua alutsista kita yang sudah rusak dengan alutsista yang baru," kata Herindra setelah menyerahkan Pesawat C-130 J Hercules kepada TNI AU, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/8).

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah membeli lima Pesawat C-130 J Super Hercules, hingga saat ini sudah ada tiga yang diterima. Ia menyebut, dalam waktu dua bulan, tambahan pesawat dari Amerika akan tiba kembali.

"Ini adalah rangkaian dari pesawat Hercules yang kita beli ada lima buah dan

nanti dua bulan lagi akan hadir. Ini adalah merupakan bukti komitmen dari pak Menhan Pak Prabowo Subianto untuk selalu meningkatkan kekuatan alutsista kita," ucap Hendra.

"Kita melihat ini adalah pesawat Hercules yang terbaru sangat canggih dan mudah-mudahan ke depan kita akan terus mendapatkan alutsista kita yang terbaik untuk menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Herindra mengatakan, selain Super Hercules, pemerintah Indonesia sudah menandatangani dua kontrak pesanan pesawat Airbus A400M multirole tanker dan transport (MRTT). Hal ini, kata dia, merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat alutsista.

"Kalau yang A400 dari Airbus kita sudah kontrak dan sudah dalam proses, kita menunggu untuk delivery-nya, kita sudah kontrak dua buah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera mendapatkan pesawat tersebut," katanya. ● han

Tujuh Orang Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi Johnny G Plate

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo kembali digelar. Kali ini, tujuh orang saksi dihadirkan ke persidangan.

Selain Johnny G. Plate, saksi juga diperuntukkan untuk terdakwa Dirut Bakti, Anang Achmad Latif dan mantan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

"Dua saksi yang kemarin, dan saksi baru dari Hudev," kata Kuasa Hukum Yohan Suryanto, Beny Daga kepada wartawan, Selasa (15/8).

Dua saksi lanjutan yang dimaksud adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti, Elvano Hatorangan dan mantan Direktur Infrastruktur Bakti, Bambang Noegroho.

Kemudian, saksi lainnya yang direncanakan hadir di ruang sidang adalah Tenaga Ahli Telekomunikasi, Kalamullah Ramli; Tenaga Ahli Elektrikal, I Ketut Suyasa; dan Tenaga Ahli Tower, Oske Rudyanto.

Kemudian, Kepala Hudev UI, Moh Amar Khoerul Umam dan General Manager HUDEV UI, Mohamad Ivan Riansa. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



SERAH TERIMA PESAWAT C-130J SUPER HERCULES

Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kedua kiri) bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman (kiri) berjalan keluar usai meninjau pesawat saat serah terima pesawat C-130J Super Hercules dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/8). Serah terima tiga dari lima pesawat C-130J Super Hercules itu nantinya akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk melaksanakan tugas-tugas TNI AU dalam mendukung angkutan udara dan Operasi Militer selain Perang (OMSP).

Hakim Heran Denda Konsorsium Proyek BTS Menciut dari Rp346 Miliar Jadi Rp87 Miliar

Saksi Elvano mengatakan perhitungan denda terhadap konsorsium yang tidak selesai sesuai terget menyimpang dan tidak sesuai dengan kontrak.

JAKARTA (IM) - Hakim kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo merasa heran terkait besaran denda yang menciut dari Rp 346 miliar menjadi Rp 87 miliar. Hal ini diungkap hakim saat memcecar saksi soal besaran denda yang dibebankan kepada konsorsium karena proyek BTS yang tak selesai sesuai target.

Keheranan hakim itu disampaikan ketika mengorek keterangan saksi yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakti, Elvano Hatorangan, yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate, eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

"Menyangkut masalah denda kemarin, denda awalnya Rp 346 miliar terus kenapa jadi Rp 87 miliar, Pak?" tanya hakim Fahzal Hendri

dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

"Jadi pada saat kita perhitungan denda itu, Yang Mulia, saya dan tim waktu itu menghitung denda kemudian Pak Anang menghampiri kami dan pada saat itu menanyakan kepada kami berapa besar nilai dendanya, kemudian saya sampaikan kepada Pak Anang bahwa nilai dendanya Rp 300 miliar sekian. Lalu Pak Anang sampaikan bahwa itu terlalu besar bagi penyedia, jadi beliau," jawab Elvano.

"Perhitungan denda itu kan ada hitung-hitungannya, apakah sesuai dengan hitung-hitungannya nggak?" tanya hakim Fahzal.

"Pada saat perhitungan yang Rp 346 (miliar) itu sesuai, Yang Mulia," jawab Elvano.

"Kemudian jadi menciut jauh ke bawah menjadi Rp 87 miliar?" tanya hakim Fahzal.

"Iya, Yang Mulia," jawab Elvano.

Elvano mengatakan uang denda Rp 87 miliar dari tiga konsorsium sudah diterima. Dia menyebut denda itu turun menjadi Rp 87 miliar atas permintaan eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif, dengan alasan pertimbangan dampak pandemi COVID-19. "Berapa masing-masing konsorsium membayar denda?" tanya hakim Fahzal.

"Masing-masing untuk paket 1 itu Rp 24 miliar, paket 2 itu Rp 21 miliar, paket 3 itu Rp 15 miliar, paket 4 itu Rp 10 miliar, paket 5 itu Rp 14 miliar dengan total Rp 87 miliar," jawab Elvano.

Elvano sempat menjelaskan bagaimana aturan perhitungan denda tersebut. Namun, katanya, Anang, yang saat itu menjabat Dirut Bakti, meminta agar denda diringankan karena dampak COVID-19.

"Pada saat itu Pak Anang memerintahkan kami untuk melakukan perhitungan denda berdasarkan dampak COVID juga, Yang Mulia, PPKM dan sebagainya," jawab Elvano.

Hakim kemudian bertanya bagaimana cara perhitungan denda Rp 87 miliar tersebut. Elvano mengatakan perhitungan tersebut menyimpang dan tidak sesuai

dengan kontrak.

"Jadi dari surat edaran PPKM yang diterbitkan dari pemerintah daerah kemudian kita menyimpulkan bahwa ada hari yang tidak bisa dimasuki oleh, tidak bisa dilakukan pekerjaan, Yang Mulia. Jadi itu menjadi hari pengurangan dendanya, Yang Mulia," ujar Elvano.

"Jadi ada hitung-hitungan sendiri itu, diperbolehkan atau tidak, menyimpang dari kontrak itu, Pak?" tanya Hakim Fahzal.

"Menyimpang, Yang Mulia," jawab Elvano.

"Diperbolehkan apa tidak itu yang saya tanya?" tanya hakim Fahzal.

"Tidak," jawab Elvano.

Elvano mengatakan denda Rp 87 miliar itu sudah dikembalikan ke kas negara. Hakim pun heran karena Elvano tetap mengikuti arahan Anang untuk memberi keringanan denda meski sudah mengetahui hal itu melanggar kontrak.

"Rp 347 miliar, dicit-cit kayak gitu, hitung-hitung sama ahli perhitungan kerugian keuangan negara itu masuk kerugian negara itu pak, seharusnya negara menerima nggak jadi menerima sebanyak itu. Rp 347 miliar kurang Rp 87 miliar, itulah kerugiannya. Dari sisi

denda aja itu, biar Saudara tahu. Kalau bekerja dengan benar sebagai PPK itu Pak, benar dari awal, menyimpang, oh ini saya diarahkan ini, kalau gitu saya nggak sanggup jadi PPK pak, ini mempertanggungjawabkan uang negara yang triliunan, ngeri saya, kalau saudara betul-betul bekerja menurut keilmuan yang saudara miliki," kata hakim.

Sebelumnya, Johnny G Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo hingga menyebabkan kerugian negara Rp 8 triliun. Plate diadili bersama eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

Sebagai informasi ada tiga konsorsium di proyek BTS yakni: Konsorsium Fiber Home, PT Telkominfra, dan PT Multi Trans Data (PT MID) pemenang untuk paket 1 dan 2. Kemudian, Konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT Surya Energi Indotama (SEI) untuk paket 3. Lalu, Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia paket 4 dan 5. ● han

Elektabilitas Rendah Diduga Jadi Alasan Golkar Batal Usung Airlangga Capres 2024

JAKARTA (IM) - Partai Golkar tidak jadi mengusung ketua umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Elektabilitas yang rendah diduga sebagai alasannya.

Dugaan ini disampaikan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi. Sebab menurut survei berbagai lembaga, tingkat elektoral Airlangga berada di

papan bawah, di kisaran angka 1 persen. Angka ini jauh di bawah elektabilitas sejumlah tokoh, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Atas situasi itu, tak heran jika Golkar turut mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Jika merujuk hasil berbagai survei oleh sejumlah

lembaga, harus diakui memang elektabilitas Airlangga sangat minimal sehingga tidak mencalonkan Airlangga adalah langkah yang bijak," kata Ari kepada wartawan, Selasa (15/8).

Partai Golkar sedianya punya modal besar untuk menempatkan kadernya jadi cawapres pendamping Prabowo. Sebab, partai beringin itu dinilai selevel de-

ngan Gerindra. Pada Pemilu 2019, perolehan suara Golkar dan Gerindra hampir sama. Saat itu, Golkar mendapat 17.229.789 suara, sedikit di bawah Gerindra yang mengantongi 17.596.839 suara.

Bahkan jika dikonversi ke kursi DPR RI, perolehan kursi Golkar pada Pemilu 2019 justru unggul dari Gerindra. Golkar mendapat 85 kursi, sedangkan Gerindra memperoleh 78 kursi DPR RI.

"Golkar sebagai kendaraan politik yang besar bahkan selevel Gerindra dalam perolehan suara di Pemilu 2019 akan sangat mubazir jika tidak menargetkan di posisi cawapres," ujar Ari.

Perolehan suara Golkar jauh melampaui dua partai politik lain yang juga mendukung Prabowo yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pada Pemilu 2019, PKB mengantongi 13.570.970 suara dengan konversi 58 kursi DPR RI. Sementara, PAN mendapatkan 9.572.623 suara dengan konversi 44 kursi DPR RI.

Atas modal ini, menurut Ari, Partai Golkar bisa berperan sebagai "asisten masinis" gerbong koalisi pendukung Prabowo.

"Dengan modalitas politik yang dimiliki Golkar, sangat mubazir hanya menjadi penumpang koalisi," jelasnya. Ari mengatakan, batalnya pencapresan Airlangga

pastinya diputuskan melalui forum yang selevel dengan musyawarah nasional (munas) Golkar. Sebab, rencana pencapresan Airlangga semula diputuskan dalam Munas Golkar 2019.

"Jika Airlangga Hartarto telah mendapat mandat sebagai capres melalui Munas Partai Golkar, maka mengubah arah dukungan dengan menyokong pencapresan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra harusnya juga melalui forum munas," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya diberitakan, Golkar menyatakan dukungan untuk bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, PKB, dan PAN untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil Munas Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Munas juga memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi capres Golkar pada Pemilu 2024.

Keputusan Golkar mendukung Prabowo itu pun menuai beragam reaksi di internal partai beringin. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, misalnya, menyinggung hasil Munas Golkar tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres. ● mei



MARIO DANDY DITUNTUT PENJARA 12 TAHUN

Terdakwa kasus penganiayaan atas Cristalino David Ozora, Mario Dandy Satriyo (kiri) berdiskusi dengan kuasa hukumnya di sela sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (15/8). Jaksa menuntut Mario dengan pidana penjara 12 tahun serta membayar restitusi (ganti rugi) terhadap David sebesar Rp120 miliar atau jika tidak dibayar akan diganti hukuman tujuh tahun penjara.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Persetujuan bersama seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. ECHO BEACH MARITIM, tertanggal 16 Agustus 2023, Pemegang Saham PT. ECHO BEACH MARITIM, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), telah memutuskan membubarkan dan melikuidasi perseroan.
Segala keberatan/Sanggahan dan tagihan terhadap perseroan dapat diajukan kepada EDI SOLIHIN sebagai Likuidator, melalui email indra@emerhub.com dan menghubungi nomor 0811154579, dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman ini.
Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 147 UU No. 40/2007 Tentang Perseroan terbatas.
Jakarta, 16 Agustus 2023
Likuidator
PT. ECHO BEACH MARITIM INDONESIA

PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI PT. EMERALD ASIA INVESTMENT
Untuk memenuhi ketentuan pasal 152 ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dengan ini diumumkan bahwa PT. EMERALD ASIA INVESTMENT (Dalam Likuidasi) "perseroan", berkedudukan di Jakarta Selatan telah selesai melaksanakan tahapan pembubaran dan likuidasi, termasuk menerima, menyetujui dan mengesahkan neraca likuidasi akhir perseroan, pembebasan dan pembayaran kewajiban dan utang kepada para kreditor dan pihak ketiga, pengajuan permohonan pencabutan perizinan perseroan serta pelepasan dan pembebasan tanggung jawab secara penuh kepada likuidator perseroan.
Jakarta, 16 Agustus 2023
Likuidator
PT. EMERALD ASIA INVESTMENT